PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

UNIT KERJA : **DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAKKASAU**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **435295**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.032.245.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/140 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 2485 m2 di KAB / KOTA KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 37.245.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 155.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, AVANZA VELOZ 2016 MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 4.935.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 54.130.410**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 81.867.458**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.328.177.868**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**401.062.547**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**927.115.321**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.